

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2014, data kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas pada pasal 43 menjelaskan setiap puskesmas wajib melakukan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik yang paling sedikit mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, survey lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2014).

Menurut Kementerian Kesehatan, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan fungsi puskesmas tersebut, diperlukan manajemen Puskesmas yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan yang berkualitas. Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan dukungan sistem informasi puskesmas yang baik, mulai dari pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan, sampai pada pengolahan dan pemanfaatannya

Sebelum menjadi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) pencatatan dan pelaporan dikenal dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas yaitu kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas termasuk puskesmas pembantu (Sibuea, 2016).

Untuk data yang didapat dari SP2TP dari sisi standarisasi sudah tidak update, contohnya pelaporan diagnosa penyakit yang digunakan di SP2TP menggunakan standar ICDIX padahal yang digunakan di aplikasi P-care BPJS sendiri yaitu ICDX. Serta Format pelaporan sudah dirubah sesuai dengan kebutuhan pelaporan program kesehatan. Maka Pusdatin kemenkes memberikan pengembangan pengupdatean dari SP2TP menjadi SIP.

Sistem Informasi Puskesmas yang dilakukan secara elektronik adalah versi terbaru SIKDA Generik. Disebut versi terbaru karena SIKDA Generik merupakan bentuk elektronik dari sistem pencatatan pelaporan di puskesmas dengan versi yang belum sempurna, dimana hanya sebagian laporan yang dapat dikeluarkan. Sistem informasi puskesmas elektronik selain dapat mencatat seluruh pelayanan juga dapat menghasilkan seluruh laporan (Sibuea, 2016).

Dalam upaya mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas yang berbasis Teknologi Informasi. Prototipe SIK yang dikembangkan mengacu kepada kebutuhan informasi untuk pengelolaan klien dan unit pelayanan di tingkat puskesmas, SP2TP, Indikator SPM dan Indikator Indonesia Sehat 2010 (Kemenkes, 2016).

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menaungi 44 Puskesmas dari 29 Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 274 Wilayah Desa dan Kelurahan. Setiap puskesmas telah menjalankan Sistem Informasi Puskesmas secara SIKDA Generik. Kabupaten Tangerang juga ingin mengembangkan sistem informasi kesehatan yang berbasis komputer dengan harapan data dan

informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi agar efisiensi dan efektifitas kerja meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membuat laporan magang mengenai “Gambaran Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Laporan Sistem Informasi Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019”.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran sistem pengelolaan data dan informasi laporan sistem informasi puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.
- 2) Mengetahui gambaran Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.
- 3) Mengetahui gambaran Input meliputi SDM, Anggaran, Sarana Prasaran Fasilitas, Metode, Aplikasi SIKDA Generik Pengelolaan Data dan Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.
- 4) Mengetahui gambaran Proses meliputi Penerimaan Data, Monitoring Evaluasi Verifikasi, Rekapitulasi Data Dashboard, Pemanfaatan Tingkat Wilayah Pengelolaan Data dan Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.
- 5) Mengetahui gambaran Output Hasil Pelaporan SIP Yang Cepat, Tepat, Akurat terhadap Pengelolaan Data dan Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.

### **1.3 Manfaat Penulisan**

#### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

Diharapkan laporan ini sangat berguna untuk menambah pengalaman nyata dalam menerapkan konsep teori dengan riset di lapangan mengenai gambaran sistem pengelolaan laporan SIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019.

#### 1.4.2 Bagi Fakultas

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberi masukan informasi baru serta sebagai sarana menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi dalam system informasi kesehatan di puskesmas.

#### 1.4.3 Bagi Lahan Magang

- 1.4.3.1 Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan insitusi lain yang terlibat dalam magang baik untuk kegiatan penelitian maupun pengembangan.
- 1.4.3.2 Mahasiswa dapat membantu dalam kegiatan manajemen dan operasional.